

Misi diplomatik Rasul

Rasul tidak berkeinginan untuk menundukkan semua negara di bawah payung kepemimpinan politik beliau.

Realitas umat Islam

Umat tersebar dan terpecah ke dalam berbagai entitas politik. Perpecahan sudah terjadi sejak era Sahabat Nabi.

Agenda politik umat

Dua agenda besar: koalisi dan dakwah



Misi Kemanusiaan Islam & Agenda Politik Umat Abad 21

DOI: 10.5281/zenodo.16199909

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Satu pertanyaan asasi yang patut direnungkan oleh seluruh umat Islam adalah mengapa Allah *Subhanahu Wata'ala* menciptakan manusia di dunia ini, apa tujuannya? Pemahaman serta cara dalam rangka menjawab pertanyaan ini akan membentuk segala aspek perilaku seorang Muslim di dunia ini, baik pada level individu, bernegara, bahkan dalam hubungan antar negara.

Pertama, perlu dibahas dimensi pemahaman (akidah) yang muncul dari pertanyaan tadi. Hal ini menyangkut keyakinan seorang Muslim akan eksistensi Tuhan dan kedudukan mereka di hadapan-Nya. Bagi seorang yang telah berislam (Muslim), tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih derajat keyakinan semurni-murninya terhadap Allah *Subhanahu Wata'ala* sebagai Zat Esa yang telah menciptakan mereka. Surat Al-Fatihah ayat 1 hingga 4 menunjukkan keadaan yang demikian, yakni tentang keyakinan seorang

Muslim terhadap Allah *Subhanahu Wata'ala* sebagai Tuhan semesta alam dan satu-satunya Zat tempat memohon dan menghamba (*Qur'an Kemenag*, 2025). Ringkasnya, Allah *Subhanahu Wata'ala* bagi seorang Muslim berkedudukan sebagai pencipta dan Zat yang disembah, sementara manusia adalah ciptaan yang menghamba kepada Tuhan-Nya.

Kesadaran terhadap kedudukan manusia di hadapan Tuhan berada dalam spektrum dinamis yang kemudian disebut sebagai **kualitas tauhid**. Manusia tidak lebih dari sekedar budak di hadapan Tuhan yang selayaknya patuh dan tunduk kepada setiap perintah-Nya. Ketundukan manusia dalam menjalankan perintah Tuhan tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas tauhid dalam dirinya itu.

Kedua, menyangkut dimensi cara pelaksanaan (syariat) dalam menjawab pertanyaan tadi. Allah *Subhanahu Wata'ala* telah menjelaskan dengan gamblang bahwa perintah yang diberikan kepada manusia, budak-Nya itu, ketika Ia *Subhanahu Wata'ala* menciptakan mereka, adalah untuk beribadah kepada-Nya dan mewakili kedudukan-Nya (menjadi khalifah) di muka bumi dengan cara memakmurkannya, yakni berperilaku baik sesuai dengan kehendak-Nya (Surat Az-Zariyat: 56, Al-Baqarah: 30, Hud: 61, Al-Mulk: 2, Al-An'am: 165) (*Qur'an Kemenag*, 2025). Sementara, sejarah mencatat bahwa cara manusia dalam menjalankan perintah Allah untuk memakmurkan bumi itu ternyata memiliki spektrum tersendiri. Seorang Muslim dengan kualitas tauhid yang tinggi akan sekuat tenaga menjalankan perintah dengan cara yang terbaik sesuai keinginan Tuhan-Nya. Sebaliknya, seorang Muslim dapat pula menjalankan perintah Tuhannya dengan ala kadar, tidak sesuai petunjuk serta keinginan-Nya, dan bahkan mengingkari perintah-Nya. Derajat kesesuaian manusia dalam menjalankan perintah Tuhan dengan keinginan-Nya ini sering disebut sebagai **kadar kesalehan**.

Pemikiran filosofis tentang hakikat dan tujuan **kemanusiaan dalam Islam** ini bersepadan dengan bacaan reflektif terhadap konstelasi dan situasi politik umat Islam pada tingkat global. Refleksi filosofis yang menarik ini minimal menghasilkan beberapa pertanyaan logis dan turunan, seperti: Sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam



Dalam konteks hubungan antar bangsa, Rasul telah menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kemanusiaan Islam adalah target utama misi diplomatiknya.

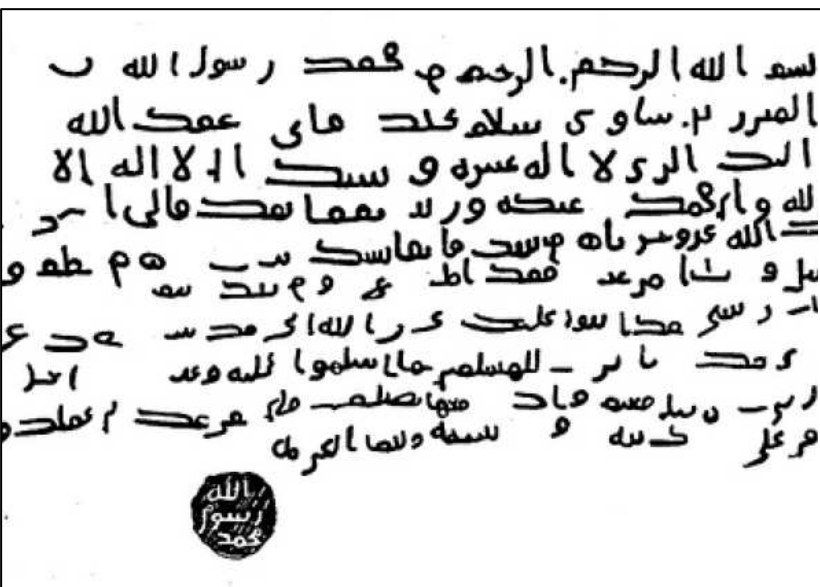
– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

menjalankan misi mereka di muka bumi?, Apakah negara-negara yang berlabel Islam telah menjalankan misi kemanusiaan Islam dengan baik sesuai kehendak-Nya?, Apa rintangan dan agenda yang pantas dicanangkan sebagai target politik global umat Islam saat ini?

Belajar dari Sejarah

Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai pembawa risalah kenabian Islam, telah menunjukkan cara terbaik dalam menjalankan misi kemanusiaan Islam. Misi yang berusaha diwujudkan dalam tiap hembusan nafas perjuangannya, yakni melahirkan masyarakat bertauhid yang mampu memakmurkan bumi sesuai kehendak Yang Maha Kuasa.

Dalam konteks hubungan antar bangsa, Rasul telah menunjukkan bahwa kesadaran terhadap kemanusiaan Islam adalah target utama misi diplomatiknya. Rasul tidak haus akan kekuasaan teritorial atau berkeinginan untuk menundukkan semua negara di bawah payung



kepemimpinan politik beliau. Tercatat dalam sejarah Islam (*siroh*) bahwa Rasul mengirimkan misi diplomatik ke beberapa negara dan otoritas politik di sekitar wilayah dakwah beliau, seperti kepada penguasa Bizantium, Persia, Aleksandria, Ghassan, Aksum, Yamamah, dan Bahrain (Ibn Ishaq, 2004). Di antara mereka ada yang menolak dengan keras, menolak namun tetap menghormati, dan bahkan menerima dengan tulus ajakan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Kepada Raja Aksum, Najasyi, Rasul menulis, "Sesungguhnya aku menyerumu kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, untuk senantiasa taat kepada-Nya dan agar engkau mengikutiku, mengimani apa yang kubawa karena aku adalah Rasul Allah *Subhanahu Wata'ala*. Sesungguhnya aku menyerumu dan bala tentaramu untuk beriman kepada Allah 'Azza wa Jalla. Telah aku sampaikan dan aku nasihatkan, maka terimalah nasihatku ini. Salam kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk" (Mufti Wilayah Persekutuan, 2019). Disebutkan bahwa Najasyi menerima dengan baik ajakan Rasul, kemudian ia juga memberikan perlindungan kepada *asylum seekers* Muslimin yang mendapatkan persekusi Qurays. Ketika Najasyi wafat, Rasul mensholati beliau dalam tata cara sholat ghaib. Ini menunjukkan bahwa Najasyi telah Muslim, namun kerajaannya tidak lantas menjadikan Islam sebagai

agama resmi negara dan tunduk secara langsung di bawah kekuasaan politik Rasullullah.

Terbentuknya negara Madinah yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul bahkan melalui proses politik paling elegan yang terjadi sepanjang sejarah politik manusia. Keberhasilan dakwah Rasul di Yatsrib (nama sebelum Madinah) mengantarkan beliau ke gelanggang politik praktis untuk berkontestasi dengan para elit politik yang didominasi oleh kubu (partai) Aus dan Khazraj. Krisis politik yang terjadi di Yatsrib membuat kubu-kubu politik, terutama Aus dan Khazraj, bersepakat menjadikan Rasul sebagai arbiter dan pemersatu untuk menghentikan krisis perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Akhirnya, para elit politik dari seluruh kubu di Yatsrib ketika itu bersepakat untuk menjadikan Rasul sebagai pemimpin negara baru dengan landasan konstitusional yang dikenal sebagai Piagam Madinah.

Negara Madinah hadir melalui proses politik alami, tanpa revolusi berdarah-darah dan aneksasi terhadap teritori sah negara lain. Naiknya Rasul ke dalam panggung politik praktis di Yatsrib didasarkan atas keberhasilan misi dakwah beliau dalam menyadarkan masyarakat Yatsrib akan hakekat kemanusiaan dalam Islam. Piagam Madinah juga menjadi bukti otentik bahwa status kewarganegaraan tidaklah melekat hanya pada satu agama tertentu. Negara Madinah mengakui pluralitas dari sisi agama, budaya, suku bangsa, serta atribut sosial lain lainnya negara modern saat ini. Sepak terjang Rasul dalam setiap sendi kehidupannya - sosial, budaya, ekonomi, maupun politik - selalu menekankan pada upaya pencapaian misi kemanusiaan Islam. Ambisi atau misi politik praktis senantiasa diletakkan di bawah misi kemanusiaan Islam.

Najasyi telah Muslim, namun kerajaannya tidak lantas menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan tunduk secara langsung di bawah kekuasaan politik Rasullullah.

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Realitas Politik Umat Abad 21

Kondisi politik umat Islam mengalami perbedaan yang sangat signifikan setelah ditinggalkan Rasul 14 abad yang lalu. Umat kini tersebar – untuk beberapa konteks juga mengalami perpecahan – ke dalam berbagai entitas politik, seperti negara-bangsa, partai politik, gerakan revolusi, dan kelompok perlawanan. Perpecahan dalam ranah politik praktis memang sudah terjadi sejak era Sahabat Nabi. Ketidakmanunggalan manajemen bernegara dalam tubuh umat memang telah terjadi seiring berjalannya dinamika internal yang diperparah dengan adanya intervensi asing seperti adanya invasi dan kolonialisasi.

Terbentuknya entitas politik yang membawa identitas Islam, semisal negara, juga terjadi dengan berbagai varian cerita. Ekspansi teritori Negara Madinah pada abad ke-7 (622 M) dan setelahnya, menjadikan negara itu sebagai sebuah imperium Kekhalifahan menyusuri tiga benua, yakni Asia, Afrika dan Eropa. Banyak pula kerajaan yang telah menerima dakwah, lantas mengadopsi ajaran Islam ke dalam sistem kenegaraan mereka. Muncullah negara-negara Islam di semenanjung India, Asia Tengah, Eropa Timur, dan sepanjang wilayah nusantara. Konsepsi negara modern yang diadopsi dari pengalaman masyarakat Barat juga menjadi realita tak terelakkan dalam dinamika politik praktis dunia Islam abad 21.

Keprihatinan muncul tatkala menyaksikan betapa banyak negara yang telah mengumandangkan syariat Islam sembari berbangga dengan aneka rupa simbol keislamannya, namun pada saat yang sama ternyata praktek bernegaranya jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*. Tengoklah betapa terpuruknya negara-negara berlabel Islam tadi dalam indikator elementer, semisal dari angka literasi masyarakatnya (Wealth Quintile, 2024). Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kaum Muslimin sendiri tentang model masyarakat seperti apa yang akan dicapai oleh negara-negara “Islam” itu jika untuk memakmurkan bumi dalam *iqro'*, wahyu pertama Allah *Ta'ala* sebagai pilar peradaban, saja masih jauh dari apa yang diharapkan. Angka-angka itu bahkan terasa lebih



menohok bila dibandingkan dengan pencapaian negara-negara Barat yang terkenal ateis atau sekularis.

Agenda Politik Umat

Analisis kritis dan faktual terhadap kondisi umat Islam sangat diperlukan guna merancang agenda terbaik bagi penuntasan misi yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Namun berdasar telaah subyektif atas akar permasalahan umat Islam sebagaimana uraian sebelumnya, kiranya gerakan politik umat Islam abad 21 dapat mengerucut pada dua agenda besar.

Pertama, orang-orang beriman itu ibarat sebuah bangunan, saling menopang satu dengan yang lain. Agenda politik pertama sebagaimana diresepkan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam sebuah hadits, adalah bergerak bersama untuk saling mendukung (*Sahih al-Bukhari* 2446, 2025). Kamus hubungan internasional modern akan menyebutnya dengan istilah koalisi atau aliansi.

Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kaum Muslimin sendiri tentang model masyarakat seperti apa yang akan dicapai oleh negara-negara “Islam” itu jika untuk memakmurkan bumi dalam *iqro'*, wahyu pertama Allah *Ta'ala* sebagai pilar peradaban, saja masih jauh dari apa yang diharapkan.

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif



“ ”
**Sentiman keislaman,
ukhuwwah Islamiyyah, itu
nyata dan berdaya guna.**

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Di tengah realitas keterpecahan struktur politik umat Islam ke dalam beberapa entitas, seruan umat untuk bergerak bersama dalam suatu agenda politik tertentu ternyata mungkin dilakukan. Sejarah mencatat berdirinya organisasi kerja sama antar negara-negara Muslim (OKI) dapat dibentuk karena terpicu oleh tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsha di Palestina. Proyek OKI membuktikan bahwa sentimen keislaman, *ukhuwwah Islamiyyah*, itu nyata dan berdaya guna.

Kedua, menjadikan semangat berislam berjalan beriringan dengan semangat untuk berdakwah. Saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia yang melarang praktik keagamaan dan dakwah ajaran Islam. Setelah perjanjian Hudaibiyyah, di saat umat Islam berdamai dengan Qurays dan diizinkan untuk mendakwahkan ajaran Islam, maka Rasul pun memberi perhatian sepenuhnya pada strategi dan upaya-upaya dakwah. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat dunia yang relatif menerima seruan Islam saat ini, umat seyogyanya juga mengikuti upaya Nabi dalam memilih dan menjalankan target-target gerakannya. Umat harus disadarkan untuk kembali ke asas (*asholah*) Islam

sebagai gerakan dakwah, bukan sekadar gerakan politik praktis. Perbaikan yang diinginkan oleh Islam bukanlah sekadar mengkategorisasikan manusia ke dalam sekat-sekat teritori politik. Karakter dasar Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*. Ia hadir untuk semua manusia di belahan bumi manapun.

Nah dalam konteks riil politik abad 21 saat ini, ide penyatuan seluruh umat Islam ke dalam suatu teritori atau entitas politik tertentu dapat ditanggapi dan didudukkan secara proporsional. Gagasan untuk mendirikan suatu negara *superpower*, semacam Khilafah Islamiyah di masa para Sahabat Nabi, yang menaungi seluruh umat di seluruh dunia justru menjadi problematik, bahkan terkesan utopis dan ahistoris. Umat sebaiknya disadarkan dengan agenda politik yang lebih riil untuk dapat mereka kerjakan.

“ ”
Karakter dasar Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*. Ia hadir untuk semua manusia di belahan bumi manapun.

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Sebagaimana Nabi praktekkan dahulu, umat sebaiknya memprioritaskan dakwah sebagai pilar perkembangan masyarakat Islam dengan terus berperan positif di mana pun mereka berada demi terwujudnya misi kemanusiaan Islam. Harus senantiasa diingat bahwa substansi ajaran Islam adalah untuk mendudukkan manusia sebagai hamba-Nya, yakni sebagai wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baik perilaku. Lantas tatkala kualitas ketauhidan dan kesalehan seorang Muslim itu memiliki spektrum, maka tugas kemanusiaannya pun akan bergerak dinamis, fluktuatif, dan terus berjalan hingga akhir zaman. 

Substansi ajaran Islam adalah untuk mendudukkan manusia sebagai hamba-Nya, yakni sebagai wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan dunia ini dengan sebaik-baik perilaku.

– Muhammad Qobidl 'Ainul Arif

Daftar Rujukan

- Ibn Ishaq. (2004). *The Life of Muhammad, A Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah* (A. Guillaume, Penerj.). Oxford University Press.
- Mufti Wilayah Persekutuan. (2019). KESAHIHAN WARKAH NABI SAW KEPADA RAJA NAJASYI. *Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan*. https://muftiwp.gov.my/ar/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3108-al-kafi-1098-kesahihan-warkah-nabi-saw-kepada-raja-najasyi#_ftn1
- Qur'an Kemenag* (Kemenag RI, Penerj.). (2025). <https://quran.kemenag.go.id/>
- Sahih al-Bukhari 2446*. (2025). <https://sunnah.com/bukhari:2446>
- Wealth Quintile. (2024). *Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above)—Afghanistan | Data*. UNESCO. <https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=AF>

Foto halaman 1: The Palestinian Information Center

Foto halaman 2: [latest.sundayguardianlive.com](https://www.latest.sundayguardianlive.com)

Foto halaman 3: flickr.com

Foto halaman 4: Wikilimages | Pixabay

Foto halaman 5: [unicef.org](https://www.unicef.org)



Biografi Penulis

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif
(Nomor Anggota: 202306002)



Qobid adalah salah satu penggagas utama berdirinya komunitas akademik the Indonesian Islamic Studies and International Relations Association (Insiera) yang diorkestrasi dalam suatu forum kelompok diskusi terarah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. Fokus kajian yang menjadi minat dan perhatiannya adalah metodologi riset berbasis wahyu serta permasalahan sosial-politik masyarakat Muslim di Eropa. Saat ini tengah menyelesaikan studi doctoral di MGIMO (Moscow State Institute of International Relations) University, Republik Federasi Rusia.

The Insiera Insight (In-Insight)

Sebuah media digital yang diterbitkan sebulan sekali, memuat opini para anggota Insiera (The Indonesian Islamic Studies and International Relations Association). In-Insight menyajikan analisis tajam terkait fenomena hubungan internasional terkini dari sudut pandang akademik melalui sumber-sumber kajian yang terpercaya, sesuai credo; "Beropini dengan Cerdas dan Bernas." Pemimpin Redaksi: Muhammad Qobidl 'Ainul Arif Redaktur: Rudi Candra, Hasbi Aswar, Prihandono Wibowo, Gustri Eni Putri, Siti Muslikhati, Surwandono, Syaiful Anam, Rizky Hikmawan, Gonda Yumitro. Layouter: Hesti Eka Denata. Distribusi: Fadhlun Nur Hakiem.